

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya Jayapura, yang terletak di pulau Nugini bagian barat atau west New Guinea. Provinsi ini dahulu dikenal dengan sebutan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973, kemudian nama tersebut diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto secara resmi hingga tahun 2002. Nama Papua awalnya digunakan oleh pelaut Portugis *Antonio d'Arbreui* yang mengunjungi pantai Papua pada tahun 1551. Sebelumnya nama itu juga digunakan oleh *Antonio Pigafetta* pada waktu berada di laut Maluku tahun 1521. Kata papua berasal dari bahasa Melayu "Pua-Pua" yang artinya keriting, dan masih digunakan hingga saat ini yang diatur dalam Undang-Undang No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Menurut Kartikasari dkk tahun (2012), Papua adalah bagian barat pulau Nugini, yang luas wilayahnya 416.129 km² dan memiliki hutan tropis yang masih berada di Asia Pasifik. Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia membagi Papua menjadi dua provinsi besar yaitu bagian barat dan timur. Bagian barat disebut provinsi Papua Barat sedangkan bagian timur tetap memakai nama provinsi Papua.

Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota madya, dimana Merauke merupakan kabupaten terluas (14,98%) dan kabupaten Supiori merupakan kabupaten/kota terkecil di provinsi Papua (0,20%). Kabupaten/kota tersebut adalah Jayapura, Sarmi, Keerom, Mamberamo Raya, Supiori, Waropen,

Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Merauke, Mappi, Asmat, Boven Digoel, Puncak Jaya, Yahukimo, Tolikara, Pegunungan Bintang, Yalimo, Lanny Jaya, Puncak, Jaya wijaya, Mamberamo Tengah, Nduga, Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Mimika, dan Kota Jayapura.

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber keuntungannya dengan melakukan segala upaya demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan bagian dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Berdasarkan UU No. 32 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dalam peraturan Daerah (Perda).

Setiap daerah memiliki sumber daya tersendiri yang dapat dipakai untuk menghasilkan pendapatan (*income*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan demikian, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku dimana sumbernya berasal dari ekonomi asli daerah.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut Halim (2004). Pendapatan daerah juga memegang peranan penting dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Secara umum, PAD

dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah menurut Warsito (2001).

Pendapatan asli daerah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Berwulo dkk tahun 2017 di kota Jayapura didapatkan terus mengalami pertumbuhan tiap tahunnya sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 yaitu 34,17% pada tahun akhir 2014. Walaupun tingkat kemandirian masih tergolong rendah bahkan belum mencapai 20%. Artinya perbandingan pertumbuhan pendapatan di kota Jayapura masih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan dari pihak eksternal.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilastuti pada tahun 2016 di kabupaten Jayapura didapatkan pertumbuhan dan penurunan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Sehingga Pada tahun 2011 didapatkan 7,61% dari tahun 2010, tahun 2012 pendapatan asli daerah kabupaten jayapura mengalami peningkatan sebesar 20,79% dari tahun 2012, dan tahun 2014 mendapatkan asli daerah kabupaten jayapura mengalami kenaikan sebesar 91,18% dari tahun 2013. Rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah kabupaten jayapura mengalami peningkatan dari tahun 2010-2014 sebesar 25,91%.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wonda di kabupaten Nabire tahun (2016), yang mendapatkan hasil pertumbuhan PAD dari tahun 2011 hingga 2013 mengalami penurunan yaitu 172% menjadi 0,12%. Pendapatan asli daerah (PAD) di berbagai kabupaten/kota di provinsi Papua berbeda-beda setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Perbandingan Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua tahun 2018-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana gambaran Pendapatan Asli Daerah antar kabupaten/kota di provinsi Papua tahun 2018-2020?
2. Bagaimana gambaran perbandingan kinerja Pendapatan Asli Daerah antar kabupaten/kota di provinsi Papua tahun 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar;

1. Untuk mengetahui gambaran Pendapatan Asli Daerah antar kabupaten/kota di provinsi Papua
2. Untuk mengetahui gambaran perbandingan kinerja Pendapatan Asli Daerah antar kabupaten/kota di provinsi Papua

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Menambah referensi serta menambah pemahaman tentang perbandingan kinerja Pendapatan Asli Daerah antar kabupaten/kota di provinsi Papua tahun 2018-2020.

2. Bagi instansi pemerintahan, diharapkan penelitian ini sebagai informasi, dapat digunakan untuk perbandingan dan sebagai acuan untuk upaya peningkatan kinerja Pendapatan Asli Daerah antar kabupaten atau Kota di provinsi Papua. dan juga untuk kabupaten/kota lain pada umumnya.
3. Bagi penelitian selanjutnya, perumusan masalah dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Dapat memberikan gambaran yang sistematis untuk mempermudah pembaca sehingga memahami masalah yang disajikan dalam penelitian ini. Maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari definisi provinsi papua, pendapatan asli daerah, sumber pendapatan daerah, pengukuran kinerja, pentingnya penilaian kinerja, cara pengukuran kinerja dan rasio kinerja keuangan daerah serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan memberikan penjelasan tentang objek penelitian, jenis dan sumber data dan metode pengumpulan data, pengolahan data serta metode analisis data,

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan dibahas analisis pengelolaan data dan gambaran data, secara analisis data, dan pembahasan yang merupakan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan untuk masing-masing variable, dimana hasil dari pengolahan tersebut adalah jawaban dari rumusan dari penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

